



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 /POJK.07/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR  
JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan tindakan kerugian konsumen, dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.

4. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan yang disampaikan baik dalam bentuk data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.
6. Pengaduan Berindikasi Sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
7. Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian ungkapan oleh Konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh LJK yang diduga terjadi karena kesengajaan atau kelalaian LJK.
8. Pengaduan adalah Pengaduan Berindikasi Sengketa dan Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.
9. Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir dari PUJK kepada Konsumen secara lisan maupun tertulis.
10. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
11. Fasilitasi adalah upaya penyelesaian Sengketa dengan mempertemukan Konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian Sengketa yang

hasilnya dituangkan dalam akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.

12. Fasilitasi Secara Terbatas adalah upaya penyelesaian Sengketa dengan mempertemukan Konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian Sengketa tanpa adanya akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.
13. Fasilitator adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Fasilitasi.
14. Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan hasil pemberian Fasilitasi yang bersifat final dan mengikat bagi Konsumen dan PUJK.
15. Berita Acara adalah dokumen tertulis yang memuat ketidaksepakatan hasil Fasilitasi.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima Informasi dan/atau penyelesaian Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan Konsumen dan masyarakat.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum.

### BAB II

#### JENIS LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

#### Pasal 4

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyediakan 3 (tiga) jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh Konsumen

dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat berupa:

- a. layanan penerimaan Informasi;
  - b. layanan pemberian Informasi; dan
  - c. layanan Pengaduan.
- (2) Informasi yang dapat diterima dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, produk, dan Informasi lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat dapat memberikan dan meminta Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat, surat elektronik, dan/atau laman Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### LAYANAN PENERIMAAN INFORMASI

#### Pasal 6

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan tanggapan terhadap Informasi yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat.
- (2) Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV  
LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan layanan pemberian Informasi melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jika Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat meminta melalui surat dan dilengkapi dengan:
  - a. alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi, atau alamat surat elektronik; dan
  - b. dokumen identitas diri yang berlaku,Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan informasi melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Informasi kepada LJK melalui surat dan/atau surat elektronik untuk melakukan layanan pemberian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) LJK wajib memenuhi permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan informasi melalui surat dan/atau surat elektronik.
- (3) Jika terdapat kondisi yang berada di luar kendali LJK, LJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

BAB V  
LAYANAN PENGADUAN

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan terhadap permintaan Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat untuk upaya penyelesaian:

1. Pengaduan Berindikasi Sengketa; dan/atau
2. Pengaduan Berindikasi Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bagian Kesatu

Layanan Pengaduan Berindikasi Sengketa

Paragraf 1

Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Berindikasi  
Sengketa

Pasal 10

- (1) Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan Berindikasi Sengketa untuk dilakukan upaya penyelesaian.
- (2) Upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Fasilitasi; atau
  - b. Fasilitasi Secara Terbatas.
- (3) Pengaduan Berindikasi Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. cq Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen cq satuan kerja di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen; atau
  - b. cq Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengaduan Berindikasi Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

dan kelengkapan dokumen paling kurang sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian dan/atau potensi kerugian materiil yang ditimbulkan oleh:
  1. Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  2. Asuransi umum baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pengaduan Berindikasi Sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen;
- c. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
- d. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan;



- e. Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Pengajuan penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Tanggapan Pengaduan. Dalam hal Konsumen mengajukan keberatan atas Tanggapan Pengaduan, pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal tanggapan atas keberatan; dan
  - g. Permohonan secara tertulis yang memuat deskripsi Pengaduan Berindikasi Sengketa disertai dengan dokumen pendukung paling kurang meliputi:
    - 1. identitas Konsumen;
    - 2. Tanggapan Pengaduan;
    - 3. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - 4. dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan Pengaduan Berindikasi Sengketa.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g angka 3 mengikuti format yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (7) Konsumen melengkapi dokumen Pengaduan Berindikasi Sengketa dengan:
- a. bukti tanda terima Pengaduan Berindikasi Sengketa yang ditandatangani atau diterbitkan PUJK;

- b. bukti penyampaian Pengaduan Berindikasi Sengketa kepada PUJK; dan/atau
  - c. konfirmasi penerimaan Pengaduan Berindikasi Sengketa secara lisan dari PUJK,
- jika Konsumen belum menerima Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g angka 2.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan menolak melakukan upaya penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f.
  - (9) Jika terdapat kekurangan dokumen Pengaduan Berindikasi Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan.
  - (10) Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

#### Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa kepada Konsumen dan/atau PUJK dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa.
- (3) Jika Konsumen tidak memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa.

- (4) PUJK wajib memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Apabila terdapat kondisi yang berada di luar kendali, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

#### Paragraf 2

#### Penyelesaian Sengketa Melalui Fasilitasi

#### Pasal 12

- (1) Otoritas Jasa Keuangan mempertemukan PUJK dan Konsumen dalam rangka penyelesaian Sengketa.
- (2) Jika pada pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai kesepakatan, PUJK wajib melaksanakan kesepakatan.

#### Pasal 13

- (1) Jika:
  - a. dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan;
  - b. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi.

- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian Fasilitasi yang memuat:
  - a. kesepakatan untuk memilih penyelesaian Sengketa melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Aturan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Konsumen dan PUJK tidak dapat memengaruhi Fasilitator dalam upaya penyelesaian Sengketa.
  - b. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses Fasilitasi merupakan kesepakatan secara sukarela antara PUJK dan Konsumen dan bukan merupakan rekomendasi dan/atau keputusan Fasilitator.
  - c. Konsumen dan PUJK tidak dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada Fasilitator.
  - d. Konsumen wajib hadir pada saat pelaksanaan Fasilitasi, kecuali Konsumen memenuhi kondisi:
    1. kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Fasilitasi;
    2. di bawah pengampunan; atau
    3. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
  - e. Jika kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, pelaksanaan Fasilitasi dihadiri oleh perwakilan Konsumen.
- (4) Konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan penandatanganan perjanjian Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya mempertemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan.
- (5) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, Konsumen dianggap membatalkan penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan PUJK menandatangani perjanjian Fasilitasi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Fasilitasi diberikan berdasarkan permintaan dari Konsumen atau pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Jika:
  - a. kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai;
  - b. jangka waktu Fasilitasi terlampaui;
  - c. Konsumen mencabut permohonan; atau
  - d. PUJK dan/atau Konsumen tidak menaati perjanjian Fasilitasi,pelaksanaan Fasilitasi berakhir.

#### Pasal 15

- (1) Akta Kesepakatan ditandatangani oleh Konsumen dan PUJK.
- (2) Akta Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama PUJK dan Konsumen yang bersepakat;
  - b. pokok-pokok kesepakatan; dan
  - c. waktu pelaksanaan kesepakatan.
- (3) Jika tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dan PUJK menandatangani Berita Acara.

#### Pasal 16

- (1) PUJK wajib melaksanakan hasil Fasilitasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan.
- (2) PUJK wajib melaporkan tindak lanjut hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan kesepakatan.

### Paragraf 3

#### Penyelesaian Sengketa Melalui Fasilitas Secara Terbatas

#### Pasal 17

- (1) Jika:
  - a. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. Konsumen menyampaikan penegasan terkait pilihan penyelesaian Sengketa melalui Fasilitas Secara Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitas Secara Terbatas.
- (2) Konsumen menyampaikan secara tertulis penegasan atas pilihan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Jika jangka waktu penegasan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Konsumen dianggap membatalkan permohonan penyelesaian Sengketa.
- (4) Jika Konsumen memilih untuk menyelesaikan Sengketa melalui Fasilitas Secara Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan, PUJK wajib mengikuti pelaksanaan Fasilitas Secara Terbatas.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Secara Terbatas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen menegaskan pilihan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Fasilitas Secara Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Secara Terbatas diberikan berdasarkan permintaan dari Konsumen atau pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Jika Konsumen tidak hadir pada saat pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas, Konsumen dianggap membatalkan penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Konsumen memenuhi kondisi:
  - a. kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan Fasilitasi Secara Terbatas;
  - b. di bawah pengampuan;
  - c. memberitahukan alasan ketidakhadiran kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, ketidakhadiran Konsumen dikecualikan dari pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Fasilitasi Secara Terbatas dihadiri oleh perwakilan Konsumen.
- (7) Jika:
  - a. kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai;
  - b. jangka waktu Fasilitasi Secara Terbatas terlampaui;
  - c. Konsumen tidak hadir tanpa pemberitahuan pada pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas; atau
  - d. Konsumen mencabut permohonan, pelaksanaan Fasilitasi Secara Terbatas berakhir.
- (8) PUJK wajib melaksanakan hasil Fasilitasi Secara Terbatas yang telah disepakati.
- (9) PUJK wajib melaporkan tindak lanjut hasil Fasilitasi Secara Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan kesepakatan.

## Bagian Kedua

### Layanan Pengaduan Berindikasi Pelanggaran

#### Pasal 19

- (1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan Berindikasi Pelanggaran atas ketentuan

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Jika Pengaduan Berindikasi Pelanggaran dilengkapi dokumen dan informasi paling kurang sebagai berikut:
  - a. identitas Konsumen dan/atau masyarakat;
  - b. alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat surat elektronik (*email*); dan
  - c. materi atau deskripsi Pengaduan Berindikasi Pelanggaran,Pengaduan Berindikasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti.

#### Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau LJK dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.

#### Pasal 21

Jika berdasarkan penelaahan, permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### SISTEM LAYANAN KONSUMEN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

#### Pasal 22

- (1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.



- (2) PUJK wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (3) Jika terdapat Pengaduan terkait PUJK sesuai pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK wajib menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- (4) PUJK wajib menginformasikan tindak lanjut Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (5) Konsumen dapat memanfaatkan fasilitas pemantauan penyelesaian Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan mengalami gangguan, PUJK menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. cq Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen cq satuan kerja di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen; atau
  - b. cq Kepala Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Jika Konsumen menolak Tanggapan Pengaduan dan/atau tanggapan atas keberatan secara tertulis yang disampaikan PUJK dalam Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, Konsumen dapat mengajukan penyelesaian Pengaduan melalui pengadilan atau di luar Pengadilan.
- (8) Penyelesaian Pengaduan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) LJK baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah selain Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) PUJK selain Pergadaian Swasta dan Lembaga Keuangan Mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Umum, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero); atau
  - b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat,

Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan.

- (3) Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), 18 ayat (8) dan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan atau teguran tertulis;
  - b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - d. pembekuan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan tugas otoritas moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dapat disampaikan kepada otoritas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penerimaan, Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa melalui Fasilitasi Secara Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 17 dan Pasal 18 hanya dilakukan terhadap Pengaduan Berindikasi Sengketa yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian Pengaduan Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;
3. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 123

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum  
dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 /POJK.07/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT  
DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan amanah perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan menginisiasi berbagai upaya yang bersinergi dengan *stakeholders* terkait. Upaya perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu: pertama, meningkatkan kepercayaan Konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*); dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan serta di sisi lain Konsumen memahami hak dan kewajiban terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk.

Dalam rangka mencapai dua tujuan utama tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat serta pelayanan Pengaduan sesuai dengan amanat Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tindakan pencegahan kerugian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan memberikan informasi serta

edukasi bagi Konsumen dan masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan, kebutuhan Konsumen dan masyarakat terhadap informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya menjadi meningkat. Upaya penyelenggaraan pemberian informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan akan informasi tersebut. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan salah satu tindakan pelayanan Pengaduan yaitu memfasilitasi penyelesaian Pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di sektor jasa keuangan apabila saat dilakukan *internal dispute resolution* tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan PUJK.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah disebutkan Otoritas Jasa Keuangan memberikan fasilitasi penyelesaian Pengaduan Konsumen namun belum komprehensif, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan penambahan pengaturan seperti rincian mekanisme tindak lanjut Pengaduan, penyediaan pilihan upaya penyelesaian Fasilitasi atau Fasilitasi Secara Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan, jangka waktu pelaksanaan upaya penyelesaian tersebut dan kewajiban PUJK melaksanakan hasil kesepakatan.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan penerimaan informasi, layanan pemberian informasi dan layanan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, pelaksanaan layanan kepada Konsumen dan masyarakat dapat ditangani secara jelas dan komprehensif. Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem layanan tersebut secara berkelanjutan sehingga lebih andal dan informatif. Salah satunya dengan menerbitkan regulasi pendukung pelaksanaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi.

Keberadaan peraturan eksternal yang menjabarkan alur dan jangka waktu penyelesaian sengketa yang dapat dipantau penyelesaiannya melalui sistem, serta adanya Fasilitasi dan Fasilitasi Secara Terbatas bagi Konsumen yang ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam hal Konsumen dan/atau PUJK mengharapkan adanya penyelesaian melalui Otoritas Jasa

Keuangan. Dari sisi lain, baik PUJK, Konsumen maupun masyarakat akan mengetahui perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Penerbitan peraturan eksternal berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga sebagai pelaksanaan amanat perlindungan Konsumen yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala upaya dalam penyelenggaraan layanan Konsumen di sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan masyarakat serta Lembaga Jasa Keuangan secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan kepada Konsumen dan masyarakat serta Lembaga Jasa Keuangan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah untuk memberikan jaminan kerahasiaan data dan/atau Informasi Konsumen, masyarakat dan/atau Lembaga Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah agar baik Lembaga Jasa Keuangan maupun Konsumen dan masyarakat menaati hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan layanan Konsumen di sektor jasa keuangan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Perwakilan Konsumen bertindak untuk dan atas nama Konsumen dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Konsumen.



Huruf a

Layanan penerimaan Informasi merupakan layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Informasi/laporan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf b

Layanan pemberian Informasi merupakan layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap permintaan Informasi dan/atau pertanyaan (*inquiry*) yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya antara lain meliputi:

1. sektor perbankan antara lain tabungan, *safe deposit box*, kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kelembagaan, dan perizinan bank.
2. sektor industri keuangan non bank antara lain asuransi jiwa, asuransi umum, *bancassurance*, pembiayaan multi guna, pembiayaan kendaraan berdasarkan prinsip syariah, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, program pensiun iuran pasti, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah berizin dan terdaftar, kelembagaan, dan perizinan Industri Keuangan Non Bank.
3. sektor pasar modal antara lain obligasi, saham, *sukuk*, reksa dana, kelembagaan, dan perizinan Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan "Informasi lainnya" adalah Informasi yang terkait dengan sistem dan Informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dan investasi *illegal*.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "telepon" adalah telepon layanan kontak Otoritas Jasa Keuangan.

Tatap muka yang dikenal dengan istilah internasional adalah *walk in*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemberian Informasi melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (*email*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Permintaan Informasi melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (*email*).

Ayat (2)

Permintaan Informasi melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (*email*).

Permintaan Informasi kepada LJK dapat berupa dokumen atau Informasi yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan Informasi yang diminta oleh masyarakat dan Konsumen.

Ayat (3)

Kondisi yang berada di luar kendali LJK antara lain seperti adanya keterlibatan pihak lain di luar LJK dalam memenuhi permintaan Informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ditolak” adalah menolak Tanggapan Pengaduan ataupun tanggapan keberatan yang disampaikan PUJK.

Huruf c

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa termasuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Fasilitasi atau Fasilitasi Secara Terbatas.

Contoh Pengaduan yang difasilitasi adalah Pengaduan yang telah dilakukan upaya penyelesaian namun tidak mencapai kesepakatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Contoh identitas Konsumen dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau paspor yang masih berlaku, termasuk kartu keluarga dan akta kelahiran untuk Konsumen yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Angka 2

Tanggapan Pengaduan antara lain melalui surat atau surat elektronik (*email*).

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dokumen pendukung lainnya merupakan dokumen yang secara langsung dimiliki dan/atau dapat diperoleh oleh Konsumen.

Contoh dokumen pendukung dari permasalahan yang diadukan antara lain slip setoran, bukti transfer, bukti pembayaran, dan/atau surat keterangan domisili, surat keterangan kematian, surat keterangan transaksi/laporan bulanan rekening, tanggapan atas keberatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Konsumen belum menerima Tanggapan Pengaduan” adalah PUJK belum menyampaikan Tanggapan Pengaduan setelah jangka waktu penanganan Pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan terlampaui.

Bukti telah menyampaikan Pengaduan dapat berupa antara lain resi pengiriman melalui perusahaan jasa pengiriman dengan alamat pengiriman kepada alamat PUJK.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan penjelasan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Konsumen dan/atau PUJK dapat dilakukan antara lain:

1. secara langsung yaitu dengan tatap muka; atau
2. secara tidak langsung melalui surat atau surat elektronik (*email*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertemukan” adalah pertemuan antara PUJK dan Konsumen dalam rangka permintaan penjelasan lanjutan dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan sebelum pelaksanaan Fasilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak dapat memengaruhi Fasilitator” adalah dalam melaksanakan tugasnya, Fasilitator

bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk penyelesaian sengketa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Setiap kondisi dilengkapi dengan dokumen pendukung. Misalnya untuk kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Fasilitasi dilengkapi dengan surat keterangan dokter.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ketidaksepakatan termasuk juga dalam hal terjadi kebuntuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud tidak menaati perjanjian Fasilitasi antara lain konsumen tidak hadir pada saat pengambilan kesepakatan fasilitasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Mengingat lembaga alternatif penyelesaian sengketa sudah tersedia, Konsumen menegaskan pilihan penyelesaian Sengketa, yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau Fasilitasi Secara Terbatas. Apabila Konsumen memilih melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Otoritas Jasa Keuangan akan meneruskan Sengketa ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila Konsumen memilih melalui Fasilitasi Secara Terbatas, Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan proses Fasilitasi Secara Terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Setiap kondisi dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Misalnya untuk kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Fasilitasi Secara Terbatas dilengkapi dengan surat keterangan dokter.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konsumen menyampaikan informasi mengenai tidak hadir pada proses Fasilitasi Secara Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat, surat elektronik (*email*), atau telepon.

Informasi tidak hadir disampaikan sebelum proses Fasilitasi Secara Terbatas dilaksanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (8)

Hasil Fasilitasi Secara Terbatas yang telah disepakati dituangkan antara lain dalam risalah rapat.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh identitas Konsumen dan/atau masyarakat dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau paspor yang masih berlaku, termasuk kartu keluarga dan akta kelahiran untuk Konsumen yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain meminta LJK menghentikan kegiatannya, memperbaiki sistem, menyusun standar prosedur operasional, dan/atau menarik iklan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan hak akses kepada PUJK untuk memanfaatkan fasilitas pemantauan penyelesaian Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6507

LAMPIRAN I  
PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN  
NOMOR 31 /POJK.07/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI  
SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN

**FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN PENGADUAN**

**IDENTITAS KONSUMEN/MASYARAKAT**

Nama	<input type="text"/>	L <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/>	
Alamat	<input type="text"/>	RT <input type="checkbox"/>	RW <input type="checkbox"/>	
Kelurahan/Desa	<input type="text"/>	Kabupaten/Kota	<input type="text"/>	
Kecamatan	<input type="text"/>	Provinsi	<input type="text"/>	
		Kode Pos	<input type="text"/>	
Nomor Telepon Rumah	<input type="text"/>	Nomor Identitas	<input type="text"/>	
Nomor Telepon Kantor	<input type="text"/>	KTP <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	Paspor <input type="checkbox"/>
Handphone	<input type="text"/>	Identitas Lainnya ...		
Email	<input type="text"/>			
Tanggal Surat Kuasa (jika dikuasakan)	<input type="text"/>			
Penerima Kuasa	<input type="text"/>			

**DESKRIPSI PENGADUAN**

Nama	<input type="text"/>		
PUJK*			
Alamat	<input type="text"/>		
PUJK			
	Kantor Pusat <input type="checkbox"/>	Kantor Cabang <input type="checkbox"/>	Kantor Lainnya... <input type="text"/>
Perjanjian/ Dokumen Transaksi yang Disengketakan	<input type="text"/>		
Jumlah	<input type="text"/>		
Kerugian**			
Terbilang	<input type="text"/>		

Permasalahan yang disengketakan pernah diupayakan penyelesaiannya dengan PUJK Ya  Tidak

Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga arbitrase, peradilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya Ya  Tidak

Nomor registrasi pengaduan ke PUJK	<input type="text"/>
Tanggal pengajuan pengaduan ke PUJK	<input type="text"/>
Nomor surat Tanggapan Pengaduan dari PUJK	<input type="text"/>
Tanggal surat Tanggapan Pengaduan dari PUJK	<input type="text"/>

## **DOKUMEN PENDUKUNG**

Dokumen pendukung yang dilampirkan:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fotokopi bukti identitas diri               | <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Sengketa tidak sedang diproses atau pernah di putus oleh lembaga arbitrase, peradilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya |
| <input type="checkbox"/> Fotokopi Tanggapan Pengaduan dari PUJK      | <input type="checkbox"/> ...  |
| <input type="checkbox"/> Fotokopi bukti transaksi                    | <input type="checkbox"/> ...  |
| <input type="checkbox"/> Fotokopi surat kuasa (dalam hal dikuasakan) |   |

## **URAIAN RINGKAS PENGADUAN**

..., .....

(.....)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

WIMBOH SANTOSO

ttd

Wiwit Puspasari

\*) PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urus Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

\*\*) Kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung

LAMPIRAN II  
PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN  
NOMOR 31 /POJK.07/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI  
SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN**

Sehubungan dengan pengajuan penyelesaian sengketa melalui Fasilitasi/Fasilitasi secara Terbatas, dengan ini saya:

Nama :  
Nomor Identitas :  
Alamat :

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya termasuk lembaga alternatif penyelesaian Sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh OJK.

Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya maka OJK berhak untuk menolak permohonan pengajuan penyelesaian Sengketa yang saya ajukan atau menghentikan jalannya proses Fasilitasi/Fasilitasi Secara Terbatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,

*Materai*

(.....)

\*) Kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari